

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia menganut dan menjunjung tinggi sistem demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang dipilih dan dianggap terbaik. Pilihan tersebut dicantumkan dengan tegas dalam Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya dilengkapi dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 2, Pasal 4, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 22 c dan Pasal 22 e, Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 28a.

Akan halnya demokrasi, Winston Churchill (Junaedi, 2008: 84) berkata : “ *it has been said that democracy is the worst form of goverment expected all the others that have been tried*”. Dalam demokrasi, rakyat sebagai subjek berperan penting dalam penentuan dan penyelenggaran kehidupan bernegara. Abraham Lincoln (Junaedi, 2008: 63) mengatakan bahwa “demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Salah satu indikator implementasi penyelenggaraan pemerintahan suatu Negara adalah diletakkannya kekuasaan tertinggi di tangan rakyat yang salah satu bentuk nyatanya adalah partisipasi politik dalam bentuk keterlibatan rakyat pada pesta demokrasi/pemilihan umum.

Pada kenyataannya, dalam perkembangan pemahaman dan aplikasi demokrasi modern, pengertian bentuk partisipasi politik diperluas tidak hanya terbatas pada keikutsertaan dalam suatu proses politik secara aktif, namun berdasarkan jenis dan intensitasnya sikap apatis sekalipun termasuk dianggap

**M. Yahya Arwiyah, 2012**

**Peranan Status Sosial Ekonomi Pemilih Dan Kualitas Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah**

: Penelitian Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Survei Terhadap Masyarakat Pemilih Bupati Kabupaten Bandung 2010

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

sebagai bentuk partisipasi politik. Diantara ahli yang mendukung pendapat tersebut adalah Milbrath dan Goel dalam Sahid (2011 : 181).

Tanpa bermaksud mengabaikan perkembangan pemahaman pengertian partisipasi yang demikian luas tersebut, diselaraskan dengan sikap dasar dan kondisi bangsa Indonesia, maka penelitian ini lebih difokuskan pada partisipasi dalam arti ikut serta secara aktif dalam proses politik. Telaahnya secara khusus yang mempengaruhi terhadap pemahaman, yakni status sosial ekonomi pemilih dan kualitas partai politik serta proses dalam partisipasi politik yang pada gilirannya mendorong seorang individu dalam sikap memilih bupati Bandung tahun 2010.

Partisipasi politik dapat menjadi salah satu ukuran tingkat kepedulian terhadap penyelenggaraan Negara, semakin tinggi partisipasi politik menunjukkan bahwa rakyat terlibat/ikut serta dalam kegiatan penyelenggaraan negara, sebaliknya semakin rendah partisipasi politik menunjukkan bahwa rakyat kurang berminat dalam kegiatan penyelenggaraan negara. Dalam hubungan ini Suryadi, Karim ( 2008:6) mengatakan bahwa efikasi politik warga Negara akan muncul apabila memberi dampak terhadap perubahan sistem politik. Pendapat ini dapat diartikan bahwa rakyat akan semakin terdorong untuk berpartisipasi apabila apa yang menjadi aspirasinya diakselerasikan oleh pemerintah yang memegang tampuk pemerintahan. Pendapat ini diperkuat oleh Huntington dan Nelson (1994: 25) yang menjelaskan bahwa:

**M. Yahya Arwiyah, 2012**

**Peranan Status Sosial Ekonomi Pemilih Dan Kualitas Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah**

: Penelitian Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Survei Terhadap Masyarakat Pemilih Bupati Kabupaten Bandung 2010

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Peranan partisipasi politik dalam masyarakat merupakan suatu fungsi dari prioritas-prioritas yang diberikan kepada variabel-variabel dan tujuan-tujuan dan dari strategi pembangunan secara keseluruhan. Keterlibatan politik adalah baik bagi masyarakat, hal itu membuat demokrasi lebih bermakna dan membuat pemerintah lebih tanggap, itu merupakan hal yang baik secara individu, karena akan membuat berkembang menjadi individu yang bermoral dan warga negara yang bertanggung jawab dalam masyarakat.

Keterlibatan warga negara dalam kehidupan politik atau partisipasi politik dapat diwujudkan dalam bentuk kontrak sosial yang dibuat oleh rakyat melalui perwakilannya untuk mendelegasikan kekuasaannya kepada pemerintah yang dipilihnya atau siapa saja pemenang pemilihan umum (Pemilu).

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum disebutkan bahwa:

Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu sudah secara umum dinyatakan sebagai wujud paling nyata dari berjalan atau tidaknya partisipasi warga Negara, walaupun seringkali ditemukan berbagai bentuk rekayasa agar formalitas yang menjadi ukuran dapat dipenuhi, namun pesta akbar ini merupakan miniatur kenyataan yang dapat menjadi ukuran gambaran sebenarnya. Dalam *South-East Asian and Pasific Conference International Commission Of Jurists* in Bangkok, Februari 15-19, 1965, telah disepakati syarat-syarat *representative government under the Rule of Law* yang

**M. Yahya Arwiyah, 2012**

**Peranan Status Sosial Ekonomi Pemilih Dan Kualitas Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah**

: Penelitian Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Survei Terhadap Masyarakat Pemilih Bupati Kabupaten Bandung 2010

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

tercantum dalam buku *The Dynamics Aspects of the Rule of Law in the Modern Age*, 1965, sebagai berikut :

(1) Perlindungan konstitusional dalam arti konstitusi selain menjamin hak-hak individu harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin; (2) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak; (3) Kebebasan untuk menyatakan pendapat; (4) Pemilihan umum yang bebas; (5) Kebebasan untuk berorganisasi dan beroposisi; (6) Pendidikan kewarganegaraan. (Astim Riyanto,2009:325).

Pemerintah Indonesia telah menyelenggarakan sepuluh kali pemilu secara periodik, yaitu pada tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, dan 2009 yang secara formal disepakati diselenggarakan secara bebas dan tidak memihak. Dimulai pada masa kepemimpinan Soekarno (Orde Lama) tahun 1955, yakni sepuluh (10) tahun setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan dana yang relatif sangat minim serta faktor keamanan yang seadanya, pemilu pada waktu itu oleh banyak pengamat dan ahli dinilai sukses dan berjalan dengan lancar. Pemilu itu adalah yang pertama kali dan terakhir dalam masa Sukarno berkuasa sebagai Presiden pertama Republik Indonesia yang akhirnya dikorbankan oleh kelompok tertentu yang berhasil merebut kewenangan penyelenggaraan negara melalui lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) yang menobatkannya sebagai Presiden seumur hidup.

Pada masa kepemimpinan Soeharto (Orde Baru) dilaksanakan 7 (tujuh) kali Pemilu masing-masing tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997. Setelah Suharto lengser diadakan pula pemilu tahun 1999. Pada pemilu 1974 semua

**M. Yahya Arwiyah, 2012**

**Peranan Status Sosial Ekonomi Pemilih Dan Kualitas Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah**

: Penelitian Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Survei Terhadap Masyarakat Pemilih Bupati Kabupaten Bandung 2010

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

partai kecuali Golongan Karya (Golkar yang kini partai Golongan Karya) dibubarkan oleh pemerintah dan digantikan oleh dua partai hasil fusi, yaitu: Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Golkar. Secara formal kedua partai tersebut adalah partai yang terpisah dan berdiri secara independent, tetapi realitas politik lebih menampakkan pada “sistem hegemonik” dimana partai Golkar yang dinobatkan sebagai pengusung pemurnian kembali pada pelaksanaan Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945 secara murni dan konsekwen menyatakan dan dinyatakan sebagai organisasi massa bukan dan bukan partai (pada saat itu), akan tetapi melakukan semua aktivitas layaknya partai politik, bahkan merupakan kekuatan yang dominan. Pada era Orde Baru ini, PDI dan PPP hanya berpartisipasi sebagai partai satelit (Sulistyo, 2003: 104).

Golongan karya memimpin pada setiap diadakannya pemilu, PDI dan PPP hanya berpartisipasi sebagai partai yang submisif (tunduk) dalam lembaga perwakilan. Pemilu lebih dirasakan sebagai sarana untuk memobilisasi masa, mengukur tingkat hegemoni Golkar dan memenuhi syarat formal sehingga dapat dijadikan alasan untuk menyatakan bahwa demokrasi telah dilaksanakan di Indonesia. Kondisi ini menyebabkan dijadikannya pemilu hanya sebagai kosmetik politik, ketimbang dijadikan sebagai sarana partisipasi politik dan pendidikan politik bagi warga masyarakat. Tidaklah mengherankan jika setiap wakil rakyat yang duduk di DPR yang seyogyanya bertugas sebagai lembaga pengontrol kinerja eksekutif, bergeser menjadi lembaga yang hanya berfungsi sebagai biro

**M. Yahya Arwiyah, 2012**

**Peranan Status Sosial Ekonomi Pemilih Dan Kualitas Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah**

: Penelitian Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Survei Terhadap Masyarakat Pemilih Bupati Kabupaten Bandung 2010

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

konsultasi, bahkan hanya sebagai pemegang cap legalisasi atas segala kebijakan dan tindakan eksekutif . Setelah melampaui waktu 32 tahun muncul gelombang reformasi yang diusung oleh mahasiswa yang berhasil meruntuhkan rezim Orde Baru pada 21 Mei 1998, dengan pengorbanan politik (*cost politics*) yang cukup besar, namun merupakan pintu gerbang untuk terciptanya pemilu yang berbeda, setidaknya berkurangnya rekayasa dan meningkatnya partisipasi politik warga Negara dibandingkan dengan pemilu yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Pada tahun 1999 adalah pemilu awal dari orde reformasi. Dalam momentum ini lebih dari 100 partai yang mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), tetapi yang memenuhi persyaratan dan berhak mengikuti Pemilu hanya sebanyak 48 partai. Pergeseran budaya politik yang sangat fundamental dari Orde Baru kepada orde reformasi yang lebih proporsional terlihat dalam banyaknya partai politik yang muncul.

Sistem pemilihan yang dilaksanakan pada tahun 1999 menginginkan terciptanya sebanyak mungkin partai politik untuk mewakili berbagai kepentingan politik yang berkembang dalam lingkungan warga masyarakat. Akan tetapi, hal tersebut ternyata bertolak belakang dan dihadang dengan essensi dari termuatnya berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum misalnya, pengaturan tentang usia minimum untuk dapat menjadi pengurus partai adalah 21 tahun, sementara usia minimum pemilih 17 tahun. Ketentuan ini menghadapkan warga negara pada suatu stigma, bahwa setelah diperlukan suaranya pada usia 17 tahun, namun seseorang harus belajar 4

**M. Yahya Arwiyah, 2012**

**Peranan Status Sosial Ekonomi Pemilih Dan Kualitas Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah**

: Penelitian Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Survei Terhadap Masyarakat Pemilih Bupati Kabupaten Bandung 2010

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

tahun baru boleh benar-benar ikut serta dalam kegiatan politik. Dalam masa 4 tahun tersebut, warga negara bertalian tentu saja dapat dimobilisir oleh kekuatan yang ada secara leluasa. Kondisi ini sebenarnya tidak bisa dipandang ringan, karena jika dihitung secara lengkap dengan mengikutseretakan warga Negara yang umurnya dalam masa transisi antara berhak memilih dan menjadi anggota partai politik, maka jumlah warga negara Indonesia yang berada pada posisi tersebut jumlahnya cukup besar. Ketentuan lainnya yang dapat dijadikan contoh, adalah hanya partai-partai yang memperoleh sekurang-kurangnya 3% kursi di DPRD yang dapat ikut dalam pemilu berikutnya (*electoral treshold*).

Pemilu yang dilaksanakan pada 7 Juni 1999 mencatatkan kemenangan 4 partai besar sebagai partai politik terkemuka, karena mendapatkan kursi cukup banyak. Empat puluh empat partai politik selebihnya yang memperoleh sekurang-kurangnya satu kursi DPR ada 15 partai politik.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang merupakan partai hasil perpecahan internal Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang tetap masih ada, menang dengan memperoleh 34% suara atau sepertiga dari jumlah suara yang sah, Golkar nomor dua dengan 22,5 persen, angka perolehan ini menunjukkan terjadinya penurunan drastis dibandingkan dengan pemilu tahun 1977 Golkar memperoleh 74,5 persen, kehilangan 61 juta suara pada tahun 1999. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) nomor 3 dengan 12,6 persen suara, dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) nomor empat dengan 10,7 persen suara. Sisa partai-partai lainnya meraih sejumlah kecil suara, yang bervariasi antara 0,3

**M. Yahya Arwiyah, 2012**

**Peranan Status Sosial Ekonomi Pemilih Dan Kualitas Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah**

: Penelitian Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Survei Terhadap Masyarakat Pemilih Bupati Kabupaten Bandung 2010

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

hingga 7 persen dari total suara dan kursi. Belasan partai lain sama sekali tidak mampu meraih suara diatas ambang batas minimum sehingga tidak mendapat kursi satupun (Sulistyo, 2003:110). Penyelenggaraan pemilu ini dianggap memenuhi standar demokrasi global, yaitu tingkat partisipasi politik warga Negara pada tahun 1999 paling tinggi. Tingkat partisipasi politik di Indonesia pada Pemilu 1955 mencapai 91,4%, Pemilu 1971 mencapai 96,6%, Pemilu 1977 dan Pemilu 1982 mencapai 96,5%, Pemilu 1987 mencapai 96,4%, Pemilu 1992 mencapai 95,1%, Pemilu 1997 mencapai 93,6%, Pemilu 1999 mencapai 92,6%, Pemilu 2004 mencapai 84,1%, dan Pemilu 2009 mencapai 70,9% ([www.kpu.com](http://www.kpu.com) diakses pada tahun 2010).

Salah satu karakteristik yang mencirikan berjalannya sistem politik demokrasi adalah terdapatnya partisipasi politik yang berkualitas yaitu dengan sikap memilih (pemberian suara) secara cerdas oleh warga negara dalam pemilu maupun pilukada. Kondisi untuk menciptakan partisipasi politik dan sikap memilih yang cerdas tidaklah mudah. Keterlibatan warga negara dalam kehidupan politik (partisipasi politik dan sikap memilih) pada pemilihan umum ataupun pemilihan kepala daerah tidak terlepas dari status sosial ekonomi pemilih dan kualitas partai. Damsar (2010: 200) menyatakan bahwa “Status sosial ekonomi pemilih memiliki beberapa indikator yang digunakan untuk melakukan analisis tentang hubungan, pengaruh atau peranan, yaitu pendidikan, pekerjaan dan pendapatan/penghasilan”. Peranan dalam penelitian ini adalah status sosial ekonomi pemilih terhadap partisipasi politik. Kegiatan warga negara yang

**M. Yahya Arwiyah, 2012**

**Peranan Status Sosial Ekonomi Pemilih Dan Kualitas Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah**

: Penelitian Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Survei Terhadap Masyarakat Pemilih Bupati Kabupaten Bandung 2010

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

berkembang pada suatu masyarakat berperan pada keterlibatan mereka dalam kehidupan politik dan peran-peran politik yang mungkin dilakukan sebagai warga negara. Menurut Huntington dan Nelson (1994 :9):

Partisipasi Politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi - pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif).

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu atau kolektif dalam artian ikut berpartisipasi secara nyata yang ditujukan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah disebut sebagai partisipasi politik. Partisipasi politik juga tidak lepas dari kualitas partai politik yang ada dalam suatu negara, menurut teori dialektika aksi Sewell (1988) dan teori strukturasi Giddens (1984) (dalam Firmanzah, 2008: 121) bahwa ideologi dianggap sebagai faktor utama bagi pemilih dalam menentukan partai yang akan dipilih dan sekaligus bisa berevolusi seiring perjalanan waktu. Sebagai kumpulan ide atau gagasan, maka ideologi partai politik menempati posisi strategis . Tentang pembagiannya Feith, H dan Catels, L menyatakan bahwa “partai politik di era demokrasi liberal dapat dibagi ke dalam lima aliran, yaitu komunisme, nasionalisme radikal, sosialisme demokrat, tradisionalism, dan Islam (Mashad, 2008: 132).

Salah satu fungsi partai politik adalah rekrutmen politik (Budiardjo, M, 2008: 406). Hal ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik secara internal partai dimana partai membutuhkan kader-kader yang berkualitas

**M. Yahya Arwiyah, 2012**

**Peranan Status Sosial Ekonomi Pemilih Dan Kualitas Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah**

: Penelitian Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Survei Terhadap Masyarakat Pemilih Bupati Kabupaten Bandung 2010

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

karena ini menentukan kualitas partai sehingga dapat mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri dalam kepemimpinan nasional yang dapat dipilih dalam pemilihan umum.

Peningkatan partisipasi politik warga negara sangat diperlukan, mengingat saat ini tidak sedikit masyarakat yang pragmatis terhadap kegiatan politik karena disibukkan dengan pemenuhan kebutuhan hidup (ekonomi) dan terjadinya penurunan kepercayaan masyarakat terhadap partai politik. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian dari Haris Syamsuddin (Andriana Nina, 2010: 135) bahwa: “terjadi penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai politik peserta pemilu pada tahun 2004. Hal ini apabila tidak dilakukan pembenahan dapat menyebabkan Negara Indonesia tidak lagi menjadi negara demokrasi. Oleh karena itu, status sosial ekonomi pemilih dan kualitas partai sebagai *tools* dalam peningkatan partisipasi politik

Menilik ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUD RI 1945 yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis sebenarnya tidak mengharuskan pemilihan secara langsung, akan tetapi karena undang-undang nomor 22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD yang tidak lagi memberikan kewenangan kepada DPRD untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah dan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan suatu kepastian hukum bahwa garisan dipilih secara demokratis berarti sebagai dipilih secara langsung.

**M. Yahya Arwiyah, 2012**

**Peranan Status Sosial Ekonomi Pemilih Dan Kualitas Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah**

: Penelitian Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Survei Terhadap Masyarakat Pemilih Bupati Kabupaten Bandung 2010

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah terdapat perbedaan /ketidaksamaan dengan unsur pengusung calon yang diusung dari partai politik peserta pemilu legislatif dan Presiden. Garis politik dari masing-masing politik yang kesepakatan koalisinya tidak sama baik di tingkat nasional, provinsi maupun daerah. Kenyataan ini tentu saja berkaitan erat dengan keinginan untuk memenangkan calon yang diusung. Diantara hal yang sangat diperhitungkan oleh kontestan adalah kondisi status sosial ekonomi pemilih dan kualitas partai politik sangat terkait dengan karakteristik masing-masing daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bandung Periode 2010-2015 dilaksanakan sejalan dengan habisnya masa jabatan Bupati Obar Sobarna pada tanggal 5 Desember 2010. Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2010, Pilkada Kabupaten Bandung 2010 yang akan memilih Bupati/ Wakil Bupati Bandung periode 2010-2015 ditetapkan dengan pemilihan putaran pertama pada 29 Agustus 2010. Oleh karena pada kenyataannya putaran pertama tidak memenuhi persyaratan untuk langsung menetapkan bupati hasil pemilihan, maka ditetapkan pelaksanaan putaran 2 ( dua) pada tanggal 31 Oktober 2010.

Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Bandung dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2010, diikuti oleh 8 ( delapan) pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Periode 2010-2015, yang lolos verifikasi dan administrasi, dari sembilan pasangan cabup-cawabup ( bupati ). Delapan yang lolos secara administratif dan sesuai

**M. Yahya Arwiyah, 2012**

**Peranan Status Sosial Ekonomi Pemilih Dan Kualitas Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah**

: Penelitian Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Survei Terhadap Masyarakat Pemilih Bupati Kabupaten Bandung 2010

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

dengan verifikasi KPU Kabupaten Bandung, 5 pasangan diusung oleh parpol dan

3 berasal calon perseorangan (independen) yakni :

1. Pasangan Marwan Efendi- Asep Nurjaman ( Independen)
  2. Pasangan Atori Herdianajaya - Dadi Gyardanijiwapraja ( Demokrat)
  3. Pasangan Tatang R Wiraatmadja - Ujang Sutrisna ( Independen)
  4. Pasangan Deding Ishak - Siswanda ( PPP, PKB, P Hanura dan PAN)
  5. Pasangan Yadi Srimulyadi - Rusna Kosasih ( PDIP-Gerindra)
  6. Pasangan Asep Soleh - Dayat Somantri ( Independen)
  7. Pasangan Dadang M.Naser - Deden Rumaji ( Golkar)
  8. Pasangan Ridho Budiman Utama - Dadang Rusdiana ( PKS dan PBB)
- (Sumber data : KPUD Jawa Barat melalui SMS Ketua KPUD Jawa Barat Tanggal 14-2-2012)

Berdasarkan data di atas, selain dari calon yang maju secara independen, terdapat perbedaan unsur pengusung, baik dari calon yang diusung pada saat pemilihan umum presiden maupun gubernur, juga semakin memperlihatkan bahwa ideologi partai dalam artian penafsiran ideologi Pancasila menurut aliran yang dianut sudah tidak begitu penting bagi partai. Hal ini tampak nyata dalam unsur pengusung calon bupati. Deden Rumaji tidak didukung oleh Partai Amanat Nasional (PAN) padahal secara institusi yang bersangkutan adalah kader dan fungsional PAN, karena quota PAN untuk mengusung calon sudah digunakan untuk mengajukan pasangan Deding Ishak – Siswanda. Pada Pilkada ini PAN berkolaborasi dengan Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ), Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ) dan Partai Hati Nurani Rakyat ( HANURA ), dalam hal ini juga terjadi kekhususan karena sebenarnya Deding Ishak adalah fungsionaris dan kader elite partai golkar. Data yang ada juga menunjukkan bahwa Rusna Kosasih adalah

**M. Yahya Arwiyah, 2012**

**Peranan Status Sosial Ekonomi Pemilih Dan Kualitas Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah**

: Penelitian Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Survei Terhadap Masyarakat Pemilih Bupati Kabupaten Bandung 2010

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

fungsionaris dan kader elit partai golkar, dan dalam Pilkada ini didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP).

Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bandung, mengalami perubahan menjadi 2.129.802 orang dari yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu 2.126.683. Penambahan ini merupakan hasil penghitungan ulang, karena pengaduan masyarakat yang merasa sudah berhak sebagai pemilih tetapi ternyata tidak terdaftar. Selain itu, tingkat partisipasi politik pemilih di Kabupaten Bandung hanya mencapai mendekati angka 65%, padahal target tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bandung tahun 2010 yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bandung 70% partisipasi pemilih. Partisipasi pemilih dapat diukur dari keputusan memilih dari masyarakat kabupaten Bandung yang dapat dilihat dari hasil penghitungan suara yang didapat. Hasil suara untuk pasangan Dadang Naser-Deden Rumaji (DNDR) 674.370 suara (53,24 persen), sedangkan pasangan Ridho Budiman Utama-Dadang Rusdiana 592.392 suara (46,76 persen).

Menilik fenomena diatas sebelumnya, dalam dinamika demokrasi di Indonesia pada saat ini banyak membangkitkan berbagai variasi kehidupan berpolitik warga masyarakat. Kondisi yang merupakan dinamika berbangsa dan bertanah air ini mencatat pula kondisi dinamik fungsi, peranan dan peranan komponen bangsa mulai dari pemerintah dengan struktur dan aparatnya, partai politik yang didukung oleh politisi sebagai fungsionaris dan kadernya serta yang

**M. Yahya Arwiyah, 2012**

**Peranan Status Sosial Ekonomi Pemilih Dan Kualitas Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah**

: Penelitian Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Survei Terhadap Masyarakat Pemilih Bupati Kabupaten Bandung 2010

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

tidak kalah pentingnya pergerakan peningkatan peran warga negara yang menjadi pemegang hak pilih. Dinamika ini berkaitan erat dengan perhitungan untuk memperoleh suara terbanyak dari warga negara pemilih. Pada gilirannya hal ini juga berhubungan dengan kegiatan warga negara yang tidak terlepas dari segala daya upaya pemenuhan hidup yang terkait langsung dengan keikutsertaan mereka dalam pemilu sebagai bagian dari partisipasi politik. Kondisi sebab akibat ini ditengarai merupakan satu kesatuan seperti layaknya bejana berhubungan, sehingga dengan rendahnya status sosial ekonomi pemilih seseorang mengakibatkan rendahnya partisipasi politik orang tersebut (Damsar, 2010: 200; Lipset dalam Budiardjo, 1994; Huntington dan Nelson, 1994: 110) selanjutnya partisipasi politik meningkat apabila didukung oleh kepercayaan warga Negara terhadap partai politik sebagai media penghubung antara kepentingan mereka dengan pemerintah, sebaliknya rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap partai politik dapat menutup sistem dan budaya demokrasi (Firmanzah, 2011: 364).

Partai politik sebagai lembaga legal peserta pemilu seharusnya dapat menjalankan fungsi dan perannya secara baik untuk mewujudkan kepentingan nasional, seperti dengan melakukan pendidikan politik bagi warga negara agar warga negara menjadi *melek* politik, sadar akan hak dan kewajiban. Hal tersebut sejalan dengan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan yaitu membentuk warga negara yang baik dan cerdas yang salah satunya adalah melakukan pendidikan politik sebagai bagian dari kajian Pendidikan Kewarganegaraan yang berintikan

**M. Yahya Arwiyah, 2012**

**Peranan Status Sosial Ekonomi Pemilih Dan Kualitas Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah**

: Penelitian Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Survei Terhadap Masyarakat Pemilih Bupati Kabupaten Bandung 2010

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

pendidikan demokrasi berwujud partisipasi warga Negara dilandasi pemahaman hak dan kewajiban. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Quigley (2000) bahwa *civic participation* berkaitan erat dengan *constitutional democracy* yang praksis tergantung pada partisipasi yang cerdas dari warga Negara. Hal tersebut sangat beralasan, karena kebijakan-kebijakan pemerintah diukur dan ditentukan oleh keputusan pemilih, dan kewenangan dalam menjalankan pemerintahan yang dibatasi dengan norma yang disepakati secara nasional, akan tetap dapat dilaksanakan secara obyektif apabila ada keberanian warga negara untuk mencegah atau memprotes penyimpangan baik etika maupun penyimpangan konstitusional. Warga Negara seharusnya didorong untuk hadir sebagai sosok yang sadar akan hak dan kewajibannya antara lain untuk berpartisipasi politik. Pendidikan Kewarganegaraan dalam pengertian sebagai *citizenship education*, idealnya secara substantive dan paedagogis didesain untuk mengembangkan warga negara yang cerdas dan baik untuk seluruh jalur dan jenjang pendidikan ataupun secara informal-nonformal sesuai dengan pendapat Cogan (1999) sebagai berikut :

*“...more inclusiveterm and encompasses both these in-school experinces as well as out-of-school or non-formal/informal learning which takes place in the family, the religious organisation, the media etc, which help to shape the totality of the citizen (Cogan dalam Budimansyah dan Winataputra, 2007: 10)*

Pendidikan kewarganegaraan didapat tidak hanya mencakup pengalaman belajar di sekolah, akan tetapi justru akan sangat berhasil guna apabila bahasannya mencakup pengalaman belajar di luar sekolah atau pendidikan nonformal atau

**M. Yahya Arwiyah, 2012**

**Peranan Status Sosial Ekonomi Pemilih Dan Kualitas Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah**

: Penelitian Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Survei Terhadap Masyarakat Pemilih Bupati Kabupaten Bandung 2010

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

informal. Lebih lanjut, Cogan (dalam dalam Budimansyah dan Winataputra, 2007: 10) berpendapat bahwa *citizenship education* konsepnya lebih luas dari *civic education*, hal ini berarti bahwa pengalaman yang ada di masyarakat merupakan dampak pengiring dari pembelajaran di sekolah. Program Pendidikan Kewarganegaraan yang dilakukan oleh partai politik di masyarakat agar masyarakat/warga negara mengetahui dan melaksanakan hak dan kewajiban dalam setiap kegiatan politik sehingga warga negara menyadari fungsi politiknya karena menurut Quigley (2000) bahwa *civic participation* berkaitan erat dengan *constitusal democracy* yang praksis tergantung pada partisipasi yang cerdas dari warga negara karena kebijakan-kebijakan pemerintah diukur dan ditentukan oleh keputusan pemilih dan warga negara yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi politik untuk kemungkinannya untuk merasa bahwa kewajiban seorang warga negara untuk berpartisipasi dalam politik. Dalam hal ini partai politik merupakan wahana Pendidikan Kewarganegaraan untuk membentuk warga negara cerdas, bertanggung jawab dan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan negara, mengingat saat ini praktek politik di Indonesia jauh dari moral, etika, dan tata krama seperti korupsi, yang dilakukan oleh pejabat publik atau kelompok elit politik sebagai kenyataan menunjukkan lemahnya proses PKn dalam domain program sosial kultural meskipun bukanlah persoalan yang hanya menjadi porsi PKn semata tetapi semua pihak sehingga perlu adanya program PKn yang dilakukan oleh berbagai pihak salah satunya adalah partai politik secara sinergi dan berkesinambungan

**M. Yahya Arwiyah, 2012**

**Peranan Status Sosial Ekonomi Pemilih Dan Kualitas Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah**

: Penelitian Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Survei Terhadap Masyarakat Pemilih Bupati Kabupaten Bandung 2010

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Berdasarkan latar belakang di atas maka judul penelitian ini ialah:

**PERANAN STATUS SOSIAL EKONOMI PEMILIH DAN KUALITAS PARTAI POLITIK DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

**(Penelitian Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Survei Terhadap Masyarakat Pemilih Bupati Kabupaten Bandung 2010).**

**B. Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah**

**1. Identifikasi Masalah**

Sebagaimana dikemukakan dalam latar belakang masalah, memilih untuk membatasi pengertian partisipasi politik warga Negara dalam berperan nyata dalam pemilihan bupati Bandung tahun 2010, ada beberapa masalah yang dianggap esensial yang dapat diidentifikasi dan menarik untuk diteliti, sebagai berikut:

- a. Target tingkat partisipasi pemilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Bandung tahun 2010 tidak tercapai karena ketercapaian partisipasi pemilih hanya sekitar 65% padahal target yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung 70% partisipasi pemilih.
- b. Sikap memilih para pemilih selama ini masih belum dibentuk berdasarkan partisipasi politik para pemilih pada kenyataannya masih banyak sikap memilih karena *money politics*, intimidasi, dan lain-lain.

**M. Yahya Arwiyah, 2012**

**Peranan Status Sosial Ekonomi Pemilih Dan Kualitas Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah**

: Penelitian Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Survei Terhadap Masyarakat Pemilih Bupati Kabupaten Bandung 2010

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

- c. Partisipasi politik pemilih di Indonesia masih sangat rendah karena tidak tahu dan memahami kemanfaatan partisipasi politik, alasan ekonomi.
- d. Sikap memilih warga negara antara lain ditentukan oleh aspek internal, yaitu kualitas diri dimana saat ini tingkat pendidikan, pendapatan dan jenis pekerjaan masih rendah sehingga mudah dipolitisasi.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis fokus masalah penelitian sebagai berikut: “Bagaimana peranan status sosial ekonomi pemilih dan kualitas partai politik dalam meningkatkan partisipasi politik pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Bandung tahun 2010?”. Berdasarkan fokus masalah tersebut, penulis menjabarkan ke dalam beberapa sub rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana peranan status sosial ekonomi pemilih dalam meningkatkan partisipasi politik di Kabupaten Bandung dalam pemilihan Bupati tahun 2010?
2. Bagaimanakah peranan kualitas partai politik dalam meningkatkan partisipasi politik terkait dengan Pendidikan Kewarganegaraan di Kabupaten Bandung pada pemilihan Bupati Bandung tahun 2010?
3. Bagaimanakah peranan status sosial ekonomi pemilih dan kualitas partai terhadap partisipasi politik pada pemilihan Bupati Bandung tahun 2010 ?
4. Bagaimana dampak status sosial ekonomi pemilih, kualitas partai, dan partisipasi politik pada sikap memilih Bupati Bandung tahun 2010?

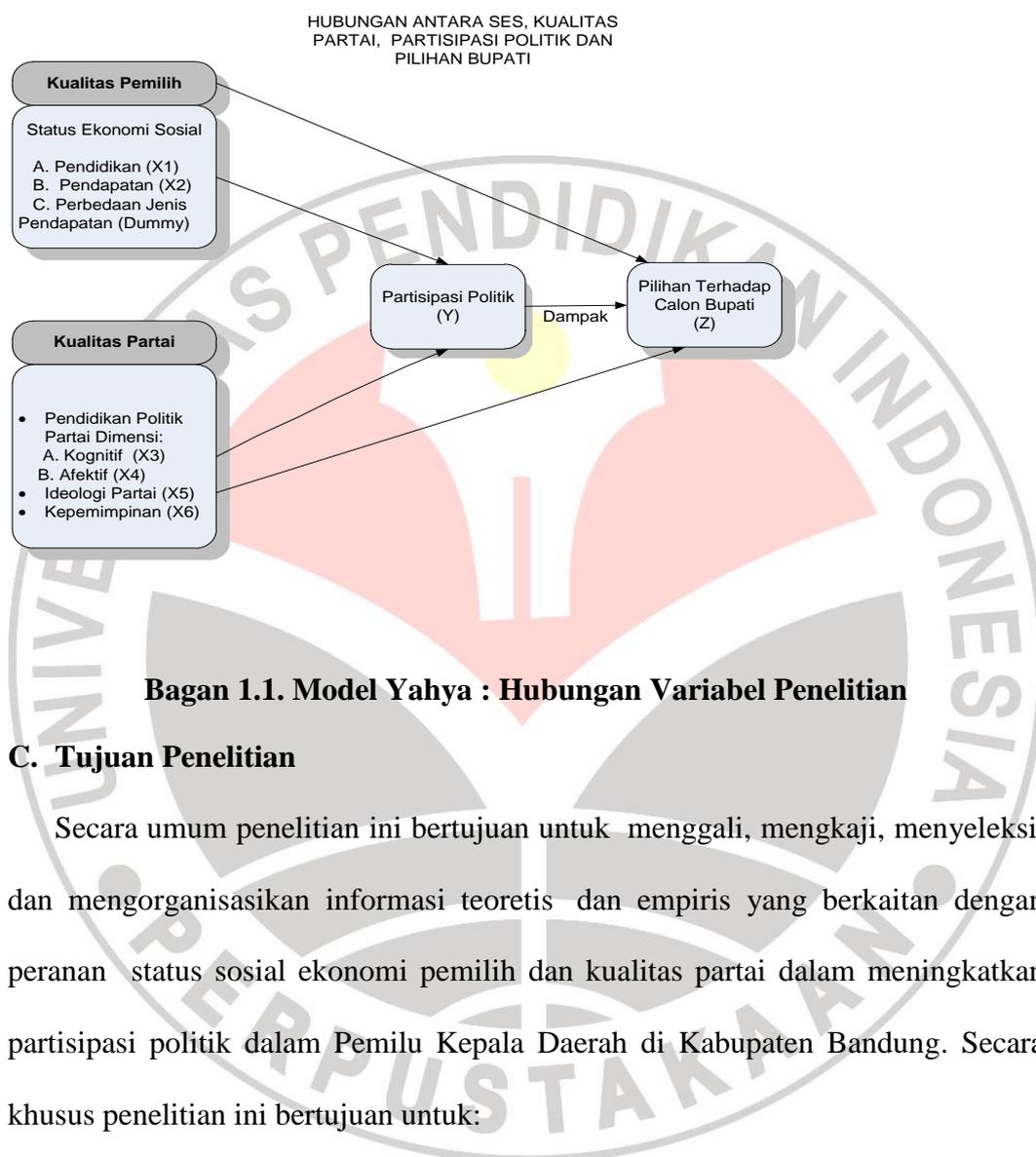
**M. Yahya Arwiyah, 2012**

**Peranan Status Sosial Ekonomi Pemilih Dan Kualitas Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah**

: Penelitian Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Survei Terhadap Masyarakat Pemilih Bupati Kabupaten Bandung 2010

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

Sesuai perumusan masalah dan pertanyaan penelitian, pola hubungan antar variabel penelitian dapat dideskripsikan sebagai berikut :



**Bagan 1.1. Model Yahya : Hubungan Variabel Penelitian**

### C. Tujuan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menggali, mengkaji, menyeleksi, dan mengorganisasikan informasi teoretis dan empiris yang berkaitan dengan peranan status sosial ekonomi pemilih dan kualitas partai dalam meningkatkan partisipasi politik dalam Pemilu Kepala Daerah di Kabupaten Bandung. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji dan menganalisis peranan status sosial ekonomi pemilih dalam meningkatkan partisipasi politik di Kabupaten Bandung dalam pemilihan Bupati tahun 2010.

**M. Yahya Arwiyah, 2012**

**Peranan Status Sosial Ekonomi Pemilih Dan Kualitas Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah**

: Penelitian Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Survei Terhadap Masyarakat Pemilih Bupati Kabupaten Bandung 2010

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

2. Mengkaji dan menganalisis peranan kualitas partai politik untuk meningkatkan partisipasi politik dalam kaitannya dengan Pendidikan Kewarganegaraan di Kabupaten Bandung dalam pemilihan Bupati pada tahun 2010.
3. Mengkaji dan menganalisis peranan kualitas partai politik dan status sosial ekonomi pemilih terhadap partisipasi politik pada pemilihan Bupati pada tahun 2010.
4. Menganalisis dampak status sosial ekonomi pemilih, kualitas partai politik, dan partisipasi politik pada sikap memilih Bupati Bandung tahun 2010.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni manfaat teoretis dan manfaat praktis.

##### **1. Secara Teoretis**

Studi ini bermanfaat untuk menjadi bahan masukan dalam mengkaji aksiologi Pendidikan Kewarganegaraan agar menumbuhkan partisipasi yang semakin objektif bagi warga negara (*voters choice*) dengan didasari pengetahuan tentang dinamika politik, dan terkait tingkat status sosial ekonomi pemilih serta kualitas partai politik dalam pengembangan teori kompetensi kewarganegaraan.

##### **2. Secara Praktis**

**M. Yahya Arwiyah, 2012**

**Peranan Status Sosial Ekonomi Pemilih Dan Kualitas Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah**

: Penelitian Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Survei Terhadap Masyarakat Pemilih Bupati Kabupaten Bandung 2010

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

- a. Bagi Pemerintah, Partai Politik dan Pendidikan dapat dijadikan dasar kajian dan rumusan tentang pengembangan partisipasi politik, pengambilan keputusan dalam memilih dan mendorong perubahan budaya politik masyarakat terkait status sosial ekonomi pemilih dan budaya partai politik terkait kualitas partai menjadi lebih demokratis.
- b. Bagi Universitas Pendidikan Indonesia, khususnya jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana sebagai institusi pembina profesi calon guru, guru, dosen dan praktisi Pendidikan Kewarganegaraan yang professional dalam melaksanakan tugasnya disandarkan pada perkembangan kondisi kekinian.
- c. Bagi partai politik, khususnya aktor politik penelitian ini sebagai bahan bagi upaya peningkatan kualitas partai politik.
- d. Bagi Pemerintah untuk memberi masukan yang berguna dalam upaya meningkatkan partisipasi politik warga negara dan memantau kinerja partai politik serta menyelaraskan regulasi pemilu yang berlaku dengan dinamika yang berkembang.

**M. Yahya Arwiyah, 2012**

**Peranan Status Sosial Ekonomi Pemilih Dan Kualitas Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah**

: Penelitian Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Survei Terhadap Masyarakat Pemilih Bupati Kabupaten Bandung 2010

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu)

## **E. STRUKTUR ORGANISASI DISERTASI**

Disertasi ini terdiri dari lima bab. Adapun isi masing-masing bab adalah sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini mulai dari status sosial ekonomi, kualitas partai, partisipasi politik, dan pendidikan kewarganegaraan.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana metode yang digunakan dalam proses penelitian meliputi: Lokasi dan Objek Penelitian, Pendekatan dan Metode Penelitian, Definisi Operasional, Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data, Proses Pengembangan Instrumen, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, Prosedur Penelitian, Variabel dan Kisi-Kisi Instrumen Penelitian.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian, pembahasan dan temuan penelitian.

### **BAB V KESIMPULAN**

Bab ini berisi tentang kesimpulan, implikasi dan saran.

**M. Yahya Arwiyah, 2012**

**Peranan Status Sosial Ekonomi Pemilih Dan Kualitas Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah**

: Penelitian Pendidikan Kewarganegaraan Melalui Survei Terhadap Masyarakat Pemilih Bupati Kabupaten Bandung 2010

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu